

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut (Timbul, 2019), *Tax avoidance* dalam kerangka sistem perpajakan yang legal, di mana seseorang atau badan usaha memanfaatkan celah pajak (*loop hole*), yaitu melaksanakan kegiatan yang legal sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi bertentangan dengan semangat dan maksud tujuan aturan perpajakan. Biasanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup kegiatan khusus dengan maksud tujuan yang semata-mata mengurangi pajak yang terutang. Sekalipun *tax avoidance* memiliki kesamaan dengan *tax evasion* yaitu dalam aktivitas yang berefek pada berkurangnya penerimaan pajak, namun *tax avoidance* tentunya berbeda dengan *tax evasion*. Dimana perbedaannya ialah *tax evasion* yang secara umum lebih kontras melanggar hukum dan dengan sengaja tidak mengungkapkan secara lengkap dan akurat objek pajaknya. Segala aktivitas yang membuat beban pajak menjadi semakin minim dengan anggapan menghemat pajak ialah merupakan *tax planning*.

Pada umumnya terkandung dua kategori penyebab terjadinya penyelundupan pajak dan penghindaran pajak:

1. Faktor-faktor yang secara negatif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya rendahnya kesadaran untuk membayar pajak

2. Tidak cukupnya tenaga kerja baik bagian administrasi maupun pengumpulan pajak, serta kurang optimalnya kapasitas audit, adanya batasan kemungkinan mendeteksi dan menghukum pelanggar UU mengakibatkan keahlian administrasi dan pengadilan pajak untuk menegaskan kewajiban pajak tentunya menjadi sangat minim.

Model-model penghindaran pajak sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* (Harga transfer), yaitu harga yang ditetapkan untuk transaksi antara divisi entitas. Entitas multinasional sering terdiri dari beberapa entitas termasuk, *branches*, *subsidiary*, *agency*, dan/atau *permanent establishment* yang pada gilirannya diperintah oleh entitas induk
2. *Thin Capitalization* (Kapitalisasi minimal), yaitu sebuah penerapan membelanjai cabang atau anak entitas dengan mengutamakan pembiayaan dengan berbunganya utang dari entitas yang mempunyai hubungan istimewa daripada dengan modal saham. Entitas biasa dibiayai oleh ekuitas dan beberapa hutang. Secara umum, bunga atas hutang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di tingkat entitas.
3. *Treaty Shopping*, yaitu praktik yang dipakai oleh entitas multinasional untuk meminimumkan pajak yang harus dilunaskan dengan trik menyalahgunakan dan memanfaatkan ketentuan dalam P3B demi untuk keuntungan yang tidak seharusnya. Memilih negara dengan perjanjian pajak yang dinilai paling sesuai dan mendirikan entitas saluran di negara tersebut, wajib pajak dapat menghindari pajak di negara sumber.

4. *Controlled Foreign Company (CFC)*, yaitu entitas anak yang didirikan di negara lain (*foreign subsidiary*) yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh pemegang sahamnya dalam upaya untuk meminimalkan perpajakan. CFC didirikan salah satunya adalah sebagai alat untuk menanggihkan kewajiban pajak atas penghasilan dari operasi entitas tersebut dengan angka menanggihkan pendistribusian dividen ke pemegang saham.
5. *Special Purpose Company (SPC)*, yaitu sebuah entitas yang dibentuk oleh suatu badan hukum dengan tujuan atau fokus yang terbatas, melangsungkan aktivitas khusus atau bersifat sementara. SPC dapat dilakukan sebagai suatu saluran dalam menghindari pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dengan langkah mendirikan entitas di salah satu negara mitra P3B (*treaty shopping*).

2.1.2 *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets ialah salah satu perbandingan yang menampilkan profitabilitas suatu entitas. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan asetnya, tingginya nilai ROA menyiratkan semakin baik performa entitas dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan adanya penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang laba kena pajak. (Hery, 2015)

Rumus yang dipakai dalam menghitung *Return on Assets* ialah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Rumus 2.1 Perhitungan ROA

2.1.3 Leverage

(Fahmi, 2017) dalam bukunya menjelaskan *Leverage* ialah rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa besar entitas dibelanjai dari adanya utang. Penggunaan utang yang dinilai sangat tinggi tentunya membahayakan entitas karena entitas akan terjatuh dalam tingkat utang yang tinggi dan susah melepaskan beban utangnya. Makanya diharapkan entitas bisa mem-*balance*-kan berapa utang yang wajar diambil serta menetapkan sumber yang berpotensi untuk membayarnya. Utang yang besar maka entitas membayar beban bunga yang tentunya akan mengurangi laba dan memperkecil pajak atas laba entitas.

Umumnya rasio *leverage* dibagi menjadi:

1. *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio (DAR)*.

Membandingkan antara jumlah utang dengan total aset yang dimiliki entitas mengisyaratkan sejauh mana dana yang dipinjam mampu dipakai untuk membeli aset. Semakin tinggi *debt ratio* menunjukkan semakin besar pula kemungkinan entitas untuk tidak dapat melunasi utangnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Rumus 2.2

Perhitungan DAR

Keterangan:

Total Liabilities = Total Utang

Total Assets = Total Aset

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Membandingkan total kewajiban dengan total modal menegaskan tingkat keterjaminan utang dari modal yang tersedia. Rasio ini mengindikasikan proporsi pemilik dalam entitas. Rasio yang semakin tinggi berarti semakin buruk, begitu juga sebaliknya.

$$DER = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total shareholders' equity}}$$

Rumus 2.3

Perhitungan DER

Keterangan:

Total Liabilities = Total Utang

Total Shareholders' Equity = Total Modal Sendiri

3. *Times Interest Earned* (TIE)

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. *Interest Expense* ialah biaya dan pinjaman pada periode berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan laba rugi. Semakin tinggi rasio kelipatan pembayaran bunga semakin baik.

$$TIE = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Rumus 2.4

Perhitungan TIE

Keterangan:

EBIT = Laba Sebelum bunga dan Pajak

Interest Expense = Beban Bunga

4. *Cash Flow Coverage*

Biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh entitas selama entitas terus menjalankan aktivitasnya. Seperti biaya sewa, biaya asuransi, biaya pajak, dan biaya-biaya lainnya. Penyusutan merupakan penurunan nilai secara berangsur-angsur pada aktiva tetap entitas. Penyusutan bisa dikecilkan dengan taktik melakukan pemeliharaan secara periodik. Perawatan secara berkala menimbulkan biaya perawatan yang disebut dengan biaya tetap.

Adapun rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$Fixed\ Cost + \frac{Aliran\ Kas\ Masuk + Depreciation}{\frac{Dividen\ saham\ preferen}{(1-tax)} + \frac{Dividen\ saham\ preferen}{(1-tax)}}$	Rumus 2.5 Perhitungan <i>Cash Flow Coverage</i>
---	---

Keterangan:

Depreciation = Penyusutan

5. *Long Term Debt to Total Capitalization*

Rasio ini mengungkapkan asal-muasal dana pinjaman yang berasal dari utang jangka panjang, bagaikan obligasi dan semacamnya. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$\frac{Long\ Term\ debt}{Long\ term\ debt + Ekuitas\ Pemegang\ Saham}$	Rumus 2.6 Perhitungan <i>Long term Debt to Total Capital</i>
--	--

Keterangan:

Long term debt = Utang jangka panjang

6. *Fixed Charge Coverage*

Rasio ini disebut dengan rasio menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Laba Usaha} + \text{Beban bunga}}{\text{beban bunga} + \text{beban sewa}}$$

Rumus 2.7 Perhitungan *Fixed Charge Coverage*

7. *Cash Flow Adequacy*

Rasio ini disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan entitas menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Perusahaan yang baik memiliki kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan arus kas, artinya mampu memberikan arus kas sesuai yang diharapkan, begitu juga sebaliknya jika arus kas yang dihasilkan tidak sesuai harapan maka memungkinkan entitas akan mengalami masalah termasuk mencari dana untuk membayar kewajibannya. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi}}{\text{Pengeluaran modal} + \text{pelunasan utang} + \text{bayar dividen}}$$

Rumus 2.8
Perhitungan *Cash Flow Adequacy*

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

(Haposan Banjarnahor, S.E., 2016) dalam penelitiannya menyatakan CSR ialah wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya sebagai kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengacuhkan kemampuan dari tradisi entitas. Dalam pengaktualisasian kewajiban ini diharapkan entitas memperhatikan serta menghormati adat istiadat masyarakat disekitar. CSR meliputi tanggungjawab terhadap pemegang saham, karyawan, pelanggan, lingkungan, serta dalam pengimplementasiannya tentunya akan berdampak pada kontinuitas entitas.

Entitas yang bisa dikategorikan baik jikalau tidak melulu mengincar keuntungan, akan tetapi haruslah mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan maupun masyarakat. CSR mulai menghangat di Indonesia sejak disahkannya UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan" Pasal 74 ayat (1). Tanggungjawab sosial bukan hanya kewajiban entitas, tetapi juga menjadi tanggungjawab kita semua, baik lembaga swasta maupun lembaga publik, individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang menamakan dirinya nir-laba. Menurut ISO 26000 entitas mempunyai tanggung jawab terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum

yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh entitas dan diaktualisasikan terhadap hubungan. (Mardikanto, 2014)

ISO 26000 pun memberikan pedoman tentang beragam kegiatan tanggung jawab sosial, yang meliputi:

1. *Organizational governance,*
2. *Human rights,*
3. *Labour Practices,*
4. *The environment*
5. *Fair operating practices*
6. *Consumer issues*
7. *Community involvement and development*

(Mardikanto, 2014) hasil survei yang dilakukan oleh *The Apen Institute* menghasilkan jenjang arti pentingnya CSR bagi perusahaan seperti:

1. Reputasi atau citra publik yang semakin membaik
2. Memperbesar loyalitas pelanggan
3. Menaikkan kepuasan/produktivitas tenaga-kerja.
4. Minimalisasi masalah yang berkaitan dengan hukum/peraturan
5. Kepercayaan pasar untuk jangka panjang
6. Memperbaiki kesehatan/kekuatan masyarakat
7. Menaikkan pendapatan
8. Berkurangnya biaya modal

9. Lebih mudah mengakses pasar internasional

Variabel dalam pengukuran metode GRI terdiri atas:

1. Indikator kinerja ekonomi; mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tak langsung
2. Indikator kinerja lingkungan; meliputi air, energi, keragaman hayati, emisi, limbah dan sampah
3. Indikator kinerja sosial; terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dll
4. Indikator kinerja praktik dan cara kerja
5. Ketenagakerjaan, hubungan perburuhan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, renumerasi yang seimbang laki-laki dan perempuan.
6. Indikator kinerja hak azasi manusia, mencakup; praktik investasi dan pengadaan, non diskriminasi, kebebasan berorganisasi dan daya tawar kolektif, buruh anak, kewajiban buruh, praktik keamanan, hak masyarakat setempat
7. Indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu; komunitas lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti-kompetitif, kepatuhan
8. Indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi; kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan, komunikasi
9. Pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan

Kementrian Lingkungan Hidup menetapkan kriteria penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), yaitu:

1. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (*Community Development*)
2. Perencanaan
3. Implementasi
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Keberlanjutan
6. Hubungan sosial

Disclosure Index yang digunakan untuk mengukur luasnya penyingkapan CSR yang telah dilaksanakan entitas. Rumus penghitungan CSR ialah:

$$\text{Disclosure Index} = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan}}{79 \text{ item informasi CSR versi GRI}}$$

Rumus 2.9
Perhitungan CSR

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan setelah sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian yang dimaksud akan dikemukakan sebagai berikut:

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Cahya Dewanti & Sujana, 2019) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan *Leverage* pada *Tax Avoidance*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. Data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda (*multiple linier regression*). Hasilnya yaitu Ukuran perusahaan dan

leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate social responsibility* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmayanti & Merkusiwati, 2019) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada *Tax Avoidance*. Penelitian berpusat kepada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dan teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasilnya yaitu ukuran perusahaan, *corporate social responsibility* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2018) tentang Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu *Return on Assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*. Penelitian difokuskan pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

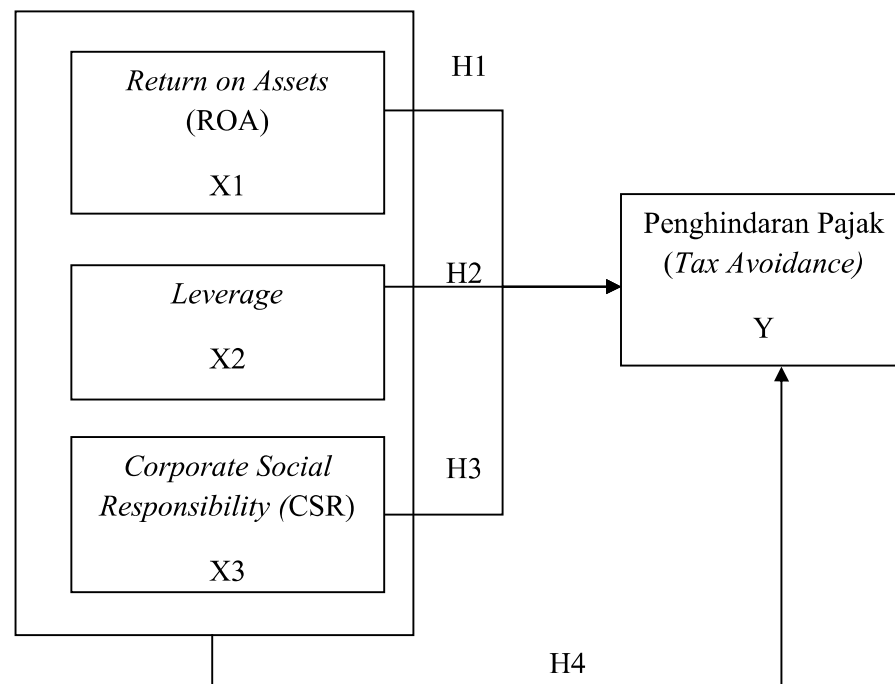
Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, Ni. Luh. Putu. Puspita., & Noviari, 2017) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian di fokuskan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *leverage* dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, Marwa, & Wahyudi, 2018) tentang *The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables* dengan hasil penelitian mengisyaratkan *transfer pricing* dan *financial distress* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *firm size* tidak dapat memoderasi setiap variabel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviyani & Munandar, 2017) tentang *Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies* dengan hasil penelitian *solvency* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* dan *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak dapat memoderasi *solvency* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*, profitabilitas dapat memoderasi *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Melalui kerangka pemikiran serta paradigma penelitian terdahulu, berikut ini adalah hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah:

1. H1: *Return on Assets* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
2. H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

3. H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
4. H4: *Return on Assets*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.